

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan dalam riset ini yakni sehubungan dengan penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Audit Mutu Internal (AMI) bagi pembentukan Outcome based Education yang menjamin penyelenggaraan kampus budaya mutu di Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri (PTKKN), belum sepenuhnya terlaksana. Pelaksanaan SPMI dan AMI yang menjamin terlaksananya kampus budaya mutu masih terkendala dalam beberapa hal, meskipun secara kesadaran kelembagaan dalam hal ini para pemangku kepentingan internal dan para pelaku kebijakan internal telah mengetahui dan menegaskan kepentingan SPMI dan Pelaksanaan AMI, juga terkait dengan dasar penerapan kampus budaya mutu, namun tetap saja pelaksanaannya masih belum jelas.

Data terkait yakni merujuk pada realisasi akreditasi PT, yang rata rata masih C, menunjukkan bahwa sistem penataan dan pelaksanaan perguruan tinggi keagamaan Kristen Negeri (PTKKN) masih terkendala, yang menegaskan juga bahwa kesiapan dan penerapan SPMI dan AMI belum maksimal. Merujuk data yang dipublikasikan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, pada pelaporan pelaksanaan SPMI dan AMI, terlapor bahwa hanya IAKN Ambon yang tercatat telah melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Hal ini menegaskan kembali bahwa, orientasi kesiapan dan keseriusan menata kampus budaya mutu masih terkendala. Kendala utama adalah pada proses penetapan dan pelaksanaan SPMI, baik di setiap STAKN dan IAKN masih lemah dalam merumuskan isi kebijakan, standar dan manual SPMI, termasuk kelemahan dalam perumusan indikator Sasaran keberhasilan yang terukur, sehingga menghambat proses AMI terlaksana dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa semangat

untuk meningkatkan mutu akademik dan layanan pendidikan bermutu masih berproses pada hal-hal yang bersifat teknis dan administratif, sehingga dalam hal konten, atau pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan baik khusus dan umum. Dalam hal ini, Kesiapan dan keseriusan dalam menata kampus budaya mutu, masih mendapat tantangan berupa kebersamaan/komitmen bersama untuk bergerak pada layanan mutu pendidikan dari orientasi input dan proses menuju pada berorientasi hasil atau output dan outcome. Secara umum kendala yang ada adalah kurangnya daya dukung SDM juga kebijakan terpusat terkait dengan hal ini, yakni dari Bimas Kristen Kementerian Agama RI, yakni dalam bentuk upaya-upaya yang mendukung terbangunnya kesiapan penerapan SPMI. Juga menyangkut lemahnya sosialisasi terhadap seluruh pemangku kepentingan, termasuk juga kesalahan strategi pengelolaan organisasi dalam menata Perguruan Tinggi membangun budaya mutu. Hal lainnya yang juga masih bersifat umum adalah adanya sikap dan pendapat bahwa pimpinanlah yang bertanggung jawab mutlak dengan peningkatan mutu, baik untuk menjamin, meningkatkan, dan membudayakan mutu dalam tanggungjawab pimpinan atau para pejabat struktural, bukan pada setiap individu yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, serta yang sangat dialami adalah ketidak-siapan sarana dan prasarana di bidang teknologi informasi. Disamping itu ada hal yang lebih mendasar yakni kurangnya kebersamaan dalam membangun sebuah budaya mutu mengingat seluruh perguruan tinggi dalam lingkup PTKKN masih mengumpul hal tersebut. Lemahnya komitmen dari otoritas institusi Perguruan tinggi dalam lingkup PTKKN menjadi kendala besar dalam mengelola/membangun komitmen bersama. Hal itu disebabkan juga karena lemahnya dasar hukum untuk menjamin legalitas pelaksanaan SPMI-PT dengan tingkat kepercayaan yang sangat kecil bagi Pusat Penjaminan Mutu internal dalam mengelola sistem mutu yang ada, juga dengan gaya kepemimpinan yang kurang optimal, Meskipun dalam status Perguruan Tinggi Negeri,

keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM juga menjadi kendala yang ada. Kekurang-kompakan menjadi kendala akut, yakni ketidak-pedulian dari para pemangku kepentingan internal tentang pentingnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan, bahkan cenderung dan memang terjadi upaya-upaya penolakan, budaya penolakan yang kuat terhadap setiap perubahan, termasuk perubahan ke arah perbaikan mutu, dalam kepentingan masing-masing unsur terkait. Hal ini terbukti dari begitu sulitnya menetapkan standar mutu dan prosedur mutu, hampir di semua STAKN dan IAKN. Secara menyeluruh dari 7 Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri yang ada, belum semua menjalankan secara menyeluruh penyelenggaraan pendidikan tinggi yang outcome based education, orientasi input, proses dan output sudah menjadi kekuatan dalam meramu setiap tahapan tersebut menjadi keutuhan outcome based education. Kurikulum yang menjadi bagian integral dari outcome based education yang didasarkan pada KKNI (kerangka kualifikasi Nasional Indonesia) megaskan bahwa kurikulum KKNI sudah memenuhi prinsip mendasar dari outcome based education. Untuk penerapan kurikulum KKNI, semua PT dalam lingkup PTKKN telah melaksanakan tuntutan penyelenggaraan pembelajaran yang outcome based, namun menyangkut hal lainnya sehubungan dengan outcome based education, masih terus diupayakan.

## **SARAN**

Kampus budaya mutu adalah keharusan bagi setiap Perguruan Tinggi, dengan mendasarkan pada terlaksananya SPMI, akan menjadi kekuatan bagi terlaksananya SPME, sehingga SPME oleh BAN-PT tidak lagi menjadi momok yang menakutkan. Juga terkait luaran akan menjadi lauran yang sangat dibutuhkan di dunia kerja dan teradaftasi maksimal dalam keilmuannya di tengah-tengah masyarakat yang menjadi kemuliaan dan penghargaan tertinggi bagi kampus. Pada siklus inilah terletak budaya mutu yang kuat.